

## **BAB VI**

### **BIDANG PEMERINTAHAN**

#### **6.1. UMUM**

Krisis ekonomi berkepanjangan yang berlanjut dengan reformasi di bidang politik dan hukum telah melahirkan perubahan cepat pada tatanan kehidupan dan perilaku masyarakat perkotaan. Di satu pihak, dampak positif dari perubahan ini adalah terjadinya transformasi dari masyarakat yang terkungkung dan tak berdaya menjadi masyarakat yang lebih berani bersuara dan memperoleh kebebasan dalam berdemokrasi, dengan harapan terciptanya struktur masyarakat yang lebih dinamis dan partisipatif. Namun di lain pihak, dampak negatif yang ditimbulkan adalah terjadinya kebebasan yang tidak terkendali dan pengabaian hukum dari sebagian masyarakat kota yang justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Dinamika politik nasional dalam lima tahun terakhir diharapkan dapat menjadi proses pembelajaran (*learning process*) bagi kehidupan masyarakat terutama dalam berperilaku politik dan berdemokrasi serta dalam menyikapi positif kebebasan yang diperolehnya. Pemerintah daerah perlu menyadari bahwa perilaku politik dan demokrasi masyarakat Jakarta dalam dinamika politik nasional mempunyai arti yang besar dalam mendukung peranserta aktif positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Dengan demikian ke depan dapat terwujud masyarakat yang diharapkan mampu mendorong peran serta positif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Dalam kaitan perubahan dan proses reformasi di atas, peranan dan eksistensi aparatur daerah sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga dituntut untuk mampu memahami kondisi objektif lingkungan masyarakatnya. Aparatur daerah diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat akan terjadinya perubahan pada pelayanan publik yang lebih adil, netral, profesional, efisien, efektif, produktif, transparan serta bebas

dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk itu, diperlukan perubahan total pada sikap, perilaku dan tindakan ke arah budaya kerja yang efektif dan efisien, berdisiplin tinggi, hemat dan bersahaja serta anti KKN. Dalam jangka menengah diharapkan akan terwujud aparatur daerah yang dapat menjadi panutan, teladan dan berwibawa serta dalam waktu bersamaan bukan menjadi aparatur yang ditakuti oleh lingkungan masyarakatnya.

## **6.2. ARAH KEBIJAKAN**

Dalam upaya merealisasikan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang berorientasi pada kepentingan publik, maka arah dan kebijakan pemerintahan daerah harus mampu melakukan perubahan mendasar secara internal dengan berorientasi pada perubahan dan perkembangan lingkungan masyarakatnya.

Arah kebijakan dari setiap fungsi pemerintahan meliputi:

### **Pemerintahan Umum**

Menciptakan sistem dan fungsi pemerintahan untuk setiap wilayah yang efektif dan efisien terutama dalam rangka pengembangan otonomi daerah dengan merumuskan kebijakan dan kewenangan wilayah administrasi kotamadya/kabupaten yang bermanfaat dalam mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan pemerintahan wilayah serta menata kembali peraturan dan administrasi pertanahan sehingga tidak terjadi adanya duplikasi sertifikasi dan pertentangan kepentingan.

### **Aparatur**

Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme pegawai yang bebas KKN, pro-aktif, serta mampu mengelola kekayaan daerah secara transparan dalam lingkungan Pemerintah Daerah

### **Perencanaan dan Pengawasan**

Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat sehingga fungsi kontrol dan proses pengawasan baik pengawasan internal maupun

pengawasan yang dilakukan masyarakat akan lebih mudah dan efektif.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dengan meningkatkan peranserta masyarakat dan sektor swasta serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif dengan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik.

### **Sistem Informasi**

Menciptakan sistem teknologi informasi dan statistik yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai basis pembangunan daerah, serta meningkatkan profesionalisme dalam statistik dan teknologi informasi.

## **6.3. STRATEGI BIDANG PEMERINTAHAN**

### **Pemerintahan Umum**

Mengoptimalkan dan mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah dan sistem pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mendukung fungsi pelayanan publik, serta mengembangkan sistem pemetaan dan penataan administrasi pertanahan.

### **Aparatur**

Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem administrasi kepegawaian, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur pemerintah Propinsi DKI Jakarta, serta menambah/menata struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif.

### **Perencanaan dan Pengawasan**

Menyusun sistem perencanaan dan pengawasan daerah yang komprehensif, mampu merumuskan pemikiran dari berbagai elemen masyarakat (*stakeholders*) dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu mengoptimalkan peran penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka menjalin hubungan yang lebih harmonis antara Propinsi DKI Jakarta dengan daerah-daerah lain dan luar negeri.

### **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Meningkatkan penataan, pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan dukungan kemajuan teknologi serta mengembangkan sistem administrasi dan pengelolaan aset-aset daerah untuk menjaga, memelihara dan melindungi semua kekayaan daerah.

### **Sistem Informasi**

Mengoptimalkan sistem informasi, teknologi informasi dan informasi pertanahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kemampuan penyediaan data-data pembangunan secara terpadu melalui usaha pengembangan sistem statistik, sistem data elektronik daerah serta pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih baik. Selain itu juga meningkatkan sistem kehumasan dan protokol dalam rangka mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat luas.

## 6.4. MATRIKS BIDANG PEMERINTAHAN

Arah kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
<b>Pemerintahan Umum</b>			
Menciptakan sistem dan fungsi pemerintahan untuk setiap wilayah yang efektif dan efisien terutama dalam rangka pengembangan otonomi daerah dengan merumuskan kebijakan dan kewenangan wilayah administrasi kotamadya/kabupaten yang bermanfaat dalam mewujudkan pengembangan dan pemberdayaan pemerintahan wilayah serta menata kembali peraturan dan administrasi pertanahan sehingga tidak terjadi adanya duplikasi sertifikasi dan pertentangan kepentingan.	Mengoptimalkan dan mengembangkan pelaksanaan prinsip-prinsip otonomi daerah dan sistem pemerintahan daerah dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka mendukung fungsi pelayanan publik, serta mengembangkan sistem pemetaan dan penataan administrasi pertanahan.	<p>1. Program Pengembangan Otonomi Daerah</p> <p>2. Program Pengembangan Pemerintahan Tingkat Propinsi</p> <p>3. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Pusat</p> <p>4. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Utara</p>	<p>a) Terlaksananya pembangunan yang berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah</p> <p>b) Meningkatnya koordinasi antara legislatif dan eksekutif</p> <p>c) Terwujudnya pelaksanaan pemerintahan daerah yang sesuai kondisi dengan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta.</p> <p>a) Terciptanya administrasi pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang tertib dan dinamis</p> <p>b) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan tingkat propinsi</p> <p>a) Terciptanya pemerintahan Jakarta Pusat yang tertib dan dinamis</p> <p>b) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Pusat</p> <p>a) Terciptanya pemerintahan Jakarta Utara yang tertib dan dinamis</p> <p>b) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Utara</p>

Lanjutan....

Arah kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
		5. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Barat	a) Terciptanya pemerintahan Jakarta Barat yang tertib dan dinamis b) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Barat
		6. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Selatan	a) Terciptanya pemerintahan Jakarta Selatan yang tertib dan dinamis b) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Selatan
		7. Pengembangan Pemerintahan Jakarta Timur	a) Terciptanya pemerintahan Jakarta Timur yang tertib dan dinamis b) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Jakarta Timur
		8. Pengembangan Pemerintahan Kepulauan Seribu	a) Terciptanya pemerintahan Kepulauan Seribu yang tertib dan dinamis b) Meningkatnya pelayanan publik yang lebih efisien oleh penyelenggara pemerintahan Kepulauan Seribu
		9. Penataan Administrasi Pertanahan	a) Tersedianya peraturan di bidang pertanahan yang lengkap, akurat dan tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah pertanahan b) Terwujudnya sistem administrasi pertanahan yang baik c) Tersedianya data penguasaan, pemilik, penggunaan tanah Propinsi DKI Jakarta d) Adanya kejelasan status seluruh lahan milik pemerintah daerah

Arah kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
<b>Aparatur</b> Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme pegawai yang bebas KKN, pro-aktif, serta mampu mengelola kekayaan daerah secara transparan dalam lingkungan Pemerintah Daerah	Meningkatkan dan mengoptimalkan sistem administrasi kepegawaian, meningkatkan kemampuan dan ketrampilan aparatur pemerintah Propinsi DKI Jakarta, serta menambah/menata struktur kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efisien dan efektif.	1. Pengembangan SDM Aparatur  2. Peningkatan Administrasi Kepegawaian  3. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur  4. Penataan Organisasi dan Ketatalaksanaan serta Pengolahan Data	a) Meningkatnya kualitas aparatur pemerintahan b) Terwujudnya aparat-aparat yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan fungsi pelayanan publik  a) Terwujudnya mekanisme administrasi kepegawaian yang lebih baik b) Terciptanya pembinaan administrasi kepegawaian yang lebih baik. a) Meningkatnya produktivitas aparatur pemerintah b) Meningkatnya jumlah pegawai yang berpendidikan sarjana c) Meningkatnya ketrampilan aparatur  a) Terbentuknya struktur lembaga dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien b) Tersusunnya uraian jabatan perangkat daerah c) Terciptanya birokrasi pemerintah yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel

Arah kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
<b>Perencanaan dan Pengawasan</b>			
Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang transparan dan mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan masyarakat sehingga fungsi kontrol dan proses pengawasan baik pengawasan internal maupun pengawasan yang dilakukan masyarakat akan lebih mudah dan efektif.	Menyusun sistem perencanaan dan pengawasan daerah yang komprehensif, mampu merumuskan pemikiran dari berbagai elemen masyarakat ( <i>stakeholders</i> ) dan bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu mengoptimalkan peran penelitian dan pengembangan, serta meningkatkan kerjasama antar daerah dalam rangka menjalin hubungan yang lebih harmonis antara Propinsi DKI Jakarta dengan daerah-daerah lain dan luar negeri.	<p>1. Pengembangan Perencanaan dan Pengendalian Rencana</p> <p>2. Program Penelitian dan Pengembangan</p> <p>3. Peningkatan Pengawasan Fungsional</p>	<p>a) Tersusunnya perencanaan daerah yang mampu menampung hasil pemikiran masyarakat</p> <p>b) Meningkatnya rasio realisasi terhadap perencanaan daerah</p> <p>c) Meningkatnya pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan daerah</p> <p>a) Tersedianya hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang relevan bagi pembangunan DKI Jakarta.</p> <p>b) Tersusunnya perencanaan pembangunan yang lebih terarah karena didasari oleh penelitian dan pengembangan.</p> <p>c) Terkelolanya dokumentasi hasil penelitian dan pengembangan</p> <p>d) Meningkatnya kemudahan pencarian referensi bagi penelitian dan pengembangan</p> <p>a) Terciptanya mekanisme check and balances dalam pelaksanaan pemerintahan</p> <p>b) Meningkatnya penyelesaian kasus KKN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>c) Meningkatnya jumlah unit kerja/dinas yang melaksanakan akuntabilitas kerjanya</p>
		4. Program Peningkatan Kerjasama antar Daerah	<p>a) Terjalinnnya hubungan dan kerjasama yang harmonis antar kota dan daerah di dalam dan luar negeri</p> <p>b) Tersedianya informasi pengalaman-pengalaman daerah-daerah lain dalam melaksanakan pembangunan.</p>

Arah kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
Meningkatkan penerimaan daerah dengan lebih mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah, baik yang berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta serta pengelolaan penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif dengan berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik.	Meningkatkan penataan, pengelolaan perbendaharaan dan administrasi keuangan daerah untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dengan dukungan kemajuan teknologi serta mengembangkan sistem administrasi dan pengelolaan aset-aset daerah untuk menjaga, memelihara dan melindungi semua kekayaan daerah.	<p>1. Peningkatan Perbendaharaan Daerah</p> <p>2. Peningkatan Administrasi Keuangan Daerah</p> <p>3. Peningkatan Penerimaan Daerah</p> <p>4. Peningkatan Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah</p>	<p>a) Terciptanya sistem perbendaharaan daerah yang tertib, transparan dan efektif.</p> <p>a) Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel</p> <p>b) Berkurangnya keluhan terhadap pengelolaan/pelayanan administrasi keuangan daerah</p> <p>a) Tercapainya penerimaan daerah yang optimal guna pelaksanaan pembangunan</p> <p>b) Tersusunnya suatu sistem dan pola penerimaan daerah yang efektif dan efisien</p> <p>c) Terjadinya perubahan struktur pendapatan daerah yang lebih sehat</p> <p>a) Tertatanya administrasi pengelolaan aset daerah dan didukung dengan data yang valid serta akurat</p> <p>b) Terinventarisasinya barang daerah secara lebih efektif dan efisien</p> <p>c) Berkurangnya kasus kerusakan dan kehilangan aset pemerintah daerah</p> <p>d) Terintegrasinya kewenangan pengelolaan kawasan khusus antara Pusat dan daerah</p>

Lanjutan.....

Arah kebijakan	Strategi	Program	Indikator Kinerja
Sistem Informasi			
Menciptakan sistem teknologi informasi dan statistik yang dapat digunakan oleh pemerintah dan masyarakat sebagai basis pembangunan daerah, serta meningkatkan profesionalisme dalam statistik dan teknologi informasi.	Mengoptimalkan sistem informasi, teknologi informasi dan geo informasi dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta meningkatkan kemampuan penyediaan data-data pembangunan secara terpadu melalui usaha pengembangan sistem statistik, sistem data elektronik daerah serta pengelolaan arsip dan dokumentasi yang lebih baik. Selain itu juga meningkatkan sistem kehumasan dan protokol dalam rangka mendukung penyediaan informasi bagi masyarakat luas.	<p>1. <b>Pengembangan Statistik Daerah</b></p> <p>2. Pengembangan Teknologi Informasi</p> <p>3. Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi</p> <p>4. Pengembangan Kehumasan dan keprotokolan</p> <p>5. Pemetaan dan Informasi Pertanahan</p>	<p>a) Tersedianya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat</p> <p>b) Terpenuhinya kebutuhan data untuk penyusunan kebijakan, program dan evaluasi pembangunan</p> <p>a) Terciptanya sistem database/elektronik yang terpadu yang mudah diakses masyarakat</p> <p>b) Terciptanya sistem informasi lintas sektoral bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan</p> <p>c) Berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam memacu manajemen pemerintahan yang lebih modern</p> <p>a) Terciptanya sistem pengelolaan arsip dan dokumentasi pemerintahan daerah yang rapi</p> <p>b) Meningkatnya kemudahan akses serta pencarian arsip dan dokumentasi yang diperlukan</p> <p>Terciptanya kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi langsung mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah</p> <p><b>Terciptanya sistem pemetaan dan informasi pertanahan daerah yang baik dan berguna bagi pembangunan daerah.</b></p>